

**PERAN POLITIK PARTAI KEDILAN SEJAHTERA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN KORUPSI DI PALEMBANG
(2004 – 2005)**



SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KEMBALI MUNAQASAH
WILLIA SURUSAN J.S.

OLEH :

AYONG HENDRA
02371351

DISETUJUI PEMBIMBING

(f. 29/07/06)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING
1. DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
2. DR. KHOLID ZULFA, M.SI

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

PERAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PALEMBANG

Pemberantasan korupsi adalah merupakan suatu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan manakala hal tersebut sudah merasuki setiap kegiatan di masyarakat tanpa mengenal jenis, golongan, jabatan dan sebagainya. di Indonesia korupsi seolah-olah telah menjadi budaya yang amat sulit ditinggalkan. Korupsi telah hidup dan berkembang serta mengakar, baik itu dalam sebuah lembaga atau instansi. Sehingga apabila ingin memberantas korupsi tersebut maka di perlukan langkah-langkah maupun strategi yang cepat dan tepat, baik pada tingkatan nasional maupun lokal. hal ini dikarenakan pemberantasan korupsi bukan hanya penegakan dalam masalah hukum semata, akan tetapi juga berkaitan erat dengan aspek politik. Adanya KPK, BPKP, BPK, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya terasa masih kurang, diperlukan komunitas lain yang perannya cukup signifikan dalam memberantas korupsi walau hanya pada dataran pelaporan dan tauladan. Di antaranya adalah oleh partai politik. Partai politik berkesempatan untuk membentuk komunitas bebas korupsi dengan betul-betul menjalankan fungsi ideal sebuah partai.

PKS merupakan partai baru yang diisi oleh aktifis dakwah dari berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, ulama, pengusaha yang titik tekan perjuangannya adalah pada aspek moral. Dengan selalu memberikan pembinaan yang dimulai dari kalangan internal partai terlebih dahulu sebelum menjadi anggota, membuat PKS menjadi partai yang benar-benar peduli terhadap kebutuhan rakyat. Keberhasilan ini pada akhirnya akan memberikan sesuatu yang positif yaitu berupa peningkatan suara pada pemilihan umum. Hal itu tidak hanya berlaku di pusat saja tetapi juga di daerah, khususnya di Palembang. PKS mampu menggerakkan kadernya untuk tidak melakukan kejadian korupsi yang bukan hanya dilarang Negara tetapi juga merupakan ajaran agama. Ini ditunjukkan dengan keberanian PKS melaporkan beberapa kasus korupsi di Palembang yang dilakukan oleh DPRD dan pejabat pemerintahan setempat.

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan, dengan pengumpulan data melalui wawancara, penelusuran dokumen baik berupa artikel pada media massa maupun cetak. Untuk wawancara penyusun lakukan dengan ketua DPD PKS kota Palembang, DPC, KPU, Tokoh masyarakat dan para ulama di Palembang. Sedangkan pendekatannya adalah menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk mencari peran sosial PKS di PAlembang. Dengan metode tersebut, penyusun mendapatkan bahwa PKS di Palembang mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam memberantas korupsi. Peran tersebut antaralain dilakukan: 1). Memberikan tauladan bagi politisi lain maupun masyarakat secara keseluruhan. 2). Membentuk komunitas yang bebas terhadap perilaku korup

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ayong Hendra

Kepada Yth,
Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Ayong Hendra

NIM : 02371351

Jurusan-Prodi : Jinayah Siyasah

Judul : Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Upaya
Pemberantasan Korupsi di Palembang (2004-2005)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 09 Rajab 1427 H
06 July 2006 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PERAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PALEMBANG (2004-2005)

Yang disusun oleh:

AYONG HENDRA

NIM: 02371351

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 11 Sya'ban 1427 H / 5 Agustus 2006 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Robi'u Šani 1427 H

15 Mei

2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, M. Hum.
NIP: 150 291 022

Sekretaris Sidang

Sunaryati, SE., M.Si.
NIP: 150 321 645

Pembimbing I

Drs. Ocktoberriansyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Penguji I

Drs. Ocktoberriansyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

Penguji II

Dr. Ahmad Yam Anshori, MA.
NIP: 150 276 308

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ayong Hendra

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

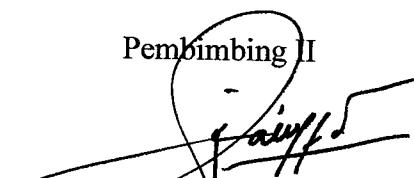
Nama : Ayong Hendra
NIM : 02371351
Jurusan-Prodi : Jinayah Siyasah
Judul : Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Palembang (2004-2005)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 09 Rajab 1427 H
06 Juli 2006 M

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

HALAMAN PERSEMPAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk



*Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda tercinta di Pedamaran,
Adik-adikku Ria, Echa, Enol, Rangga, Rendy, Rika, Yundaku Ema Eriani
dan Ermalina yang banyak membantu, Kanda Erlan Effendi (Ode),
Ahmad Taufik (Gelex), Beri Rahmat (Cakok Boret) dan Keluarga Besar di
Palembang*

Yang selalu membimbingku.....

*Sahabat-Sahabatku, Chakok Yani, Chakok Dorong, Chakok Adi, Rino
Anggoro, Masdarel Choiri, Muharromin, Camelian, Roy, Afrizal, Zainal
Aripin S.Si, terima kasih atas bantuan komputernya, Romin, Agus
Meyudi, Bayu Pratama, Mursalim Jais, Joko Susilo, Lutfil Anshori, Epon
Ekanedi S.H.I, Cicin Sitimuhsina S.H.I, Syafriadi Saragih S.H.I
Teman-teman di Asrama KABOKI, IKPM Sumsel Komisariat Bende
Seguguk, HIMANTAPA Yogyakarta
Serta Keluarga Besar JS-I Angkatan 2002*

Dan Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

“Pada kedalaman ambisi manusia, tersimpan suatu kedahsyatan, harapan yang sanggup merubah segumpal yang berkulit di dalam dirinya, menjadi selingkar matahari” (Gibran)

“Anak seorang gembala yang berilmu pengetahuan lebih baik dan mulia serta berharga bagi sebuah bangsa, disbanding dengan penguasa sang raja yang buta pengetahuannya” (Gibran)

“Beranilah untuk selalu mengatakan inilah aku, bukan mengatakan inilah bapakku, walaupun bagaimanapun salah tapi berusaha adalah lebih baik daripada tidak sama sekali” (Penyusun)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الرحمن عالم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصلة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الله وصحبه أجمعين.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., berserta keluarga serta para sahabat.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Palembang**" Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. KH. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta seluruh staff Fakultas Syariah.
3. Bapak Makhrus Munajat SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Jinayah Siyasah.
4. Bapak Ocktoberrinsyah, Mag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Ibu Dosen JS yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan.

7. Kedua Orangtuaku serta keluarga yang ada di Palembang yang selalu mendukung dan memberikan do'a demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Musliman S.Ag selaku Ketua DPD PKS Kota Palembang beserta Ustadz Mugiono yang telah mengizinkan penelitian ini.
9. Teman-temanku Jinayah Siyasah 2002, jangan menyerah dalam mengarungi cita-cita
10. Teman-temanku di Asrama Kaboki, IKPM Sumsel komisariat Bende-Seguguk dan HIMANTAPA Yogyakarta.
11. Serta semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

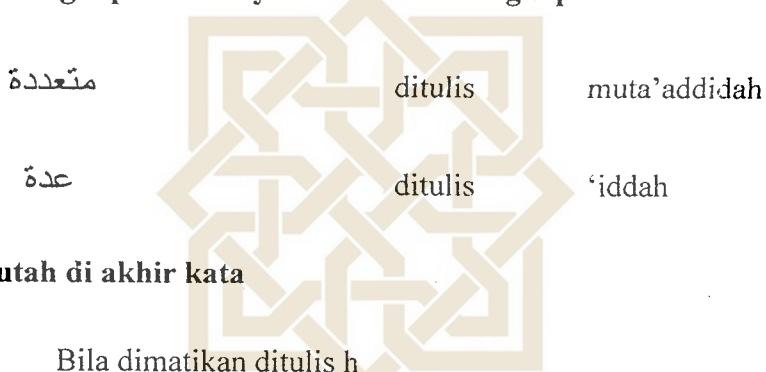
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zeť (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap



C. Ta' marbutah di akhir kata

- i. Bila dimatikan ditulis h



(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada ketentuan-ketentuan

Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya).

- ii. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis karâmah al-auliyâ'

- iii. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis t

زكاة الفطر ditulis zakâtul fitri

D. Vocal pendek

Tanda	Nama	Ditulis
—	fathah	a
—	kasrah	i
—	dammah	u

E. Vocal panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā jâhiliyyah
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	ā tansâ
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī karîm
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū furûd

F. Vocal rangkap

Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaul

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

- i. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	ditulis	al-qur'an
القياس	ditulis	al-qiyâs

ii. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>żawil furûd</i> atau <i>żawi al-furiûd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II PARTAI POLITIK

A.	Pengertian.....	18
1.	Pengertian Partai	18
2.	Pengertian Politik	21
B.	Fungsi Partai Politik.....	23
C.	Klasifikasi Partai.. ..	27
D.	Partai Politik di Indonesia	29
1.	Lahirnya Partai Politik.....	30
2.	Partai Politik di Masa Awal Kemerdekaan.....	33
3.	Partai Politik di Masa Orde Lama	39
4.	Partai Politik di Masa Orde Baru.....	43
5.	Partai Politik di Era Reformasi.....	46

BAB III EKSISTENSI PKS DI PALEMBANG

A.	Pemerintahan kota Palembang	47
	Pola Hidup Masyarakat Palembang	49
B.	Eksistensi PKS	50
1.	Sejarah Terbentuknya PKS.....	50
2.	Karakteristik dan Cita-Cita PKS.....	54
3.	Visi dan Misi PKS.....	61
4.	Politik PKS di Palembang	61

C. Peran PKS dalam pemberantasan korupsi.....	65
---	----

BAB IV ANALISIS PERAN POLITIK PKS DALAM

MEMBERANTAS KORUPSI DI PALEMBANG

A. Sandaran Politik PKS.....	73
B. Analisis Pemberantasan Korupsi.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	96
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan	I
Biografi Ulama dan Tokoh	II
Lampiran Pertanyaan	III
Curiculum Vitae	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang mayoritas penduduknya Memeluk agama Islam, sejak dahulu umat Islam Indonesia turut aktif dalam berbagai urusan kenegaraan dan kebangsaan. Mulai dari masa penjajahan oleh Bangsa Eropa sampai masa kemerdekaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan kita bisa melihat pergerakan dan perlawanan terhadap penjajah yang dimotori oleh tokoh Islam atau ulama, seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan Fatahillah. Sedangkan pada masa kemerdekaan ada beberapa tokoh seperti KH. Agus Salim, Muhammad Natsir, KH. Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh Islam lainnya.

Hasrat umat Islam Indonesia untuk tetap terus aktif dalam dunia politik merupakan konsekwensi pemahaman ajaran agama Islam yang meliputi semua aspek kehidupan termasuk politik kekuasaan.¹ Namun berbeda apabila dibandingkan dengan perkembangan keagamaan di dunia Eropa dan negeri-negeri barat lainnya, setelah Renaissance pemikiran Islam tidak pernah mengalami sekulerisasi. Bahkan pemisahan gerakan Islam dari dunia politik bisa dipandang penyimpangan ajaran. Islam dan mudah dituduh sebagai Konspirasi kekuatan anti Islam. Keterlibatan umat Islam dalam berpolitik pada saat ini dapat dibaca dari

¹ Abdul Munir Mulkhan, "Syahwat Politik Kaum Santri", *Opini Kompas*, (Jumat, 8 April 2005).

dari Pemilu 2004 yang lalu dan dinamika kecenderungan Muhammadiyah di dalam PAN dan NU di PKB. Kedua organisasi Islam Indonesia tersebut yakni NU dan Muhammadiyah jelas bukan merupakan gerakan politik. Seperti yang dirumuskan didalam Khittah masing-masing akan tetapi dalam prakteknya kedua organisasi ini sulit untuk berpisah dengan kegiatan politik.

Pada Pemilu legislatif 2004 lalu sebanyak 28 partai meramaikan pesta demokrasi yang terdiri dari beberapa partai, di antaranya partai yang menyatakan berideologi Islam adalah PPP, PBR, PBB, dan PKS serta yang lainnya. Sedangkan yang secara tidak terang-terangan menyatakan ideologi Islam yakni PKB, PAN. Dari Pemilu tersebut menghasilkan beberapa pemenang di antaranya Partai GOLKAR, PDIP, PKB, PPP, PKS, PBB dan Partai Demokrat.

Ada fenomena menarik dari Pemilu tersebut yakni naiknya posisi Partai Keadilan Sejahtera yang pada pemilihan umum tahun 1999 bernama Partai Keadilan (PK) tidak lulus Elektoral hingga harus ganti nama untuk bisa ikut pemilihan umum tahun 2004. Namun demikian bergantinya nama dari PK ke PKS tidak menghilangkan kepercayaan pemilihnya, bahkan bertambah banyak dari tahun 1999.

Naiknya perolehan suara PKS ini merupakan jawaban atas keraguan orang lain di tengah banyaknya partai yang tidak bersih dan amanah. Betapa tidak, banyak partai yang menyatakan sebagai partai yang reformis serta peduli terhadap kehidupan rakyat kecil, tetapi pada saat diberikan amanah malah disalahgunakan baik yang duduk di dewan legislatif dan eksekutif daerah maupun nasional sehingga lambat laun para pemilih beralih kepada partai yang dalam pencitraan

dan pembawaannya lebih bersih, jujur, amanah dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.² Hal ini terbukti dengan banyaknya suara yang berkurang pada partai-partai pemenang Pemilu 1999.

Pencitraan sebagai partai yang bersih, jujur, amanah dan peduli nasib rakyat kecil bukan saja dilihat dari slogan dan platform dari partai saja. Melainkan juga bisa dilihat melalui tokoh, pengurus dan kader partai dari tingkat atas sampai tingkatan yang paling bawah. Misalnya dalam hal kasus korupsi yang merajalela di Nusantara, PKS adalah partai yang selalu giat dan semangat untuk memberantas korupsi tersebut,³ karena mereka beranggapan bahwa korupsi merupakan ancaman terbesar yang bisa menggerogoti bangsa hingga menjadi bangsa yang miskin dan melarat. Dengan melawan korupsi adalah salah satu upaya untuk memotong lingkar setan yang seolah-olah telah menjadi budaya asli Indonesia. Contoh lain yang bisa dijadikan pijakan kepedulian PKS terhadap bangsa ini adalah keaktifan mereka dalam menangkap dan memberikan solusi setiap permasalahan rakyat. Misalnya sewaktu banjir di Jakarta, sampah longsor di Bandung, Tsunami di Aceh, gempa di Nias dan di tempat lain. Mereka secara spontan memberikan bantuan berupa sembako, pakaian, mendirikan tenda dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Kemudian dalam kesehariannya para politisi PKS memberikan tauladan yang baik bagi siapapun yang melihat, selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya selaku wakil rakyat mereka secara konsisten memperjuangkan suara rakyat walau

² Laode Ida, "Prospek PAN Pasca Amin Rais", *Opini Kompas*, (11 April 2005)

³ Hidayat Nur Wahid, *Wawancara SABILI*, Edisi 13, Th. XII, (14 Januari 2005/2 Dzulhijjah 1425 H)

bukan dalam masa kampanye. Namun demikian tidak sedikit yang lain menilai bahwa apa yang dilakukan para politisi PKS itu karena ada maunya atau Hidden Agenda. Terlepas dari itu semua, yang jelas pada saat ini memang betul-betul dibutuhkan pemimpin yang peduli pada rakyat kecil dan tidak hanya janji-janji saja melainkan dengan perbuatan yang nyata.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti Propinsi Riau, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan yang dinyatakan sebagai tiga propinsi terkorup di Indonesia adalah bukti nyata bahwa memang korupsi menyebar kemana-mana melewati batas ruang dan waktu.

Khusus pada kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 16 kasus korupsi dari 26 kasus korupsi yang melibatkan berbagai kalangan dan pejabat publik di Sumatera Selatan. Kasus tersebut antara lain adanya dana siluman Rp. 7.5 milliar yang tersebar dan dibagi-bagikan pada setiap anggota dewan di DPRD setempat. Dari kasus tersebut terdapat 2 tersangka yakni Adjis Saip (ketua DPRD periode 1999–2004) dituntut 2 tahun penjara. Kemudian tersangka lain adalah Abdussobur selaku pejabat sekretaris dewan waktu itu di tahan dan dibebaskan pertengahan Februari 2005.⁴

Menariknya, kasus tersebut terungkap dikarenakan salah satu anggota dewan dari PK (sekarang PKS) menolak untuk menerima uang tersebut, akhirnya kasus itu menjadi sorotan masyarakat umum, LSM dan mahasiswa. Dan mereka

⁴ "Kasus korupsi di Palembang", *Liputan Kompas*, (10 maret 2005)

bersama-sama turun ke jalan untuk berdemonstrasi menuntut agar kasus tersebut segera diusut dan mengadili siapapun yang terlibat di dalamnya.

Namun dalam perjalannya penanganan kasus-kasus tersebut terkesan ditutup-tutupi dan tidak adil, hal ini dikarenakan masih kentalnya suasana KKN di lembaga peradilan dan kepolisian serta tidak jarang para tersangka menyewa para preman untuk menakut-nakuti orang yang ingin mengungkap kasus-kasus tersebut termasuk LSM Palembang Corruption Watch (PCW) yang diancam akan dibunuh bila menggugat kasus korupsi yang ada di Palembang. Dengan demikian pembongkaran terhadap praktik korupsi tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, melainkan dengan kerja keras dan metode yang tepatlah korupsi akan terkikis habis.

Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemberantasan korupsi di Palembang yang dalam hal ini dimotori oleh Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di DPRD kota Palembang. Dan penelitian ini akan penyusun per sempit waktu penelitiannya yaitu mulai tahun 2004 (PK) sampai dengan tahun 2005 (PKS), karena pada tahun tersebut PKS banyak mengungkap beberapa korupsi yang ada di Palembang.

B. Pokok Masalah

Bagaimanakah peran politik PKS dalam upaya pemberantasan korupsi di Palembang? .

C. Tujuan dan Kegunaan :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran politik partai keadilan sejahtera dalam upaya pemberantasan korupsi di Palembang.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap Partai Keadilan Sejahtera
2. Sebagai pembelajaran bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

D. Telaah Pustaka

Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam pentas demokratisasi nasional memang terasa masih sedikit, hal ini tidak lepas dari pembentukan partai yang bisa dikatakan sebagai pendatang baru dalam kancah perpolitikan nasional. Sehingga mengakibatkan sulitnya mendapatkan buku-buku yang berhubungan dengan tema penyusun, kecuali itu hal-hal yang berkenaan PKS secara umum dapat ditemukan di buku-buku panduan anggota partai, seperti buku yang berjudul “Yang Nyata Dari PK Sejahtera, 77 manfaat dan alasan mengapa kita perlu mendukung dan memilih PK Sejahtera dalam Pemilu”. Buku karangan Satria Hadi Lubis ini memaparkan Visi & Misi, Karakteristik, Prinsip Kebijakan dan Profil HM.Hidayat Nur Wahid kemudian juga menjelaskan 25 manfaat dan alasan mendukung PK Sejahtera, 27 manfaat dan alasan memilih PK Sejahtera serta 25 manfaat dan alasan bergabung menjadi anggota PK Sejahtera.

Kemudian di dalam buku yang hampir sama yakni “Mengapa Memilih PK Sejahtera” menjelaskan bagaimana peran para politisi PKS baik yang ada di Legislatif lokal maupun nasional dalam menjalankan amanat rakyat terutama memerangi korupsi. Di buku ini juga menjelaskan sisi kepribadian para politisi

PKS yang terdiri dari kaum terpelajar dan berakhlak mulia. Selanjutnya sumber lain bisa didapatkan melalui majalah-majalah seperti Sabili, Saksi, Annida, Tarbawi dan buletin-buletin Islam lainnya.

Sementara itu buku lain yang berkenaan tentang bagaimana aktivitas umat Islam dalam dunia politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik pada masa perjuangan kemerdekaan, masa transisi maupun pasca kemerdekaan. Misalnya di dalam buku “ Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Perpolitikan Liberal ” yang dikarang oleh Samsuri. Menjelaskan bagaimana para politikus Islam (Masyumi) beradu strategi dengan PKI bahkan akhirnya berhasil membubarkan partai tersebut. Kemudian di dalam buku karangan Deliar Noer yang berjudul “Partai Islam di Pentas Nasional” diutarakan bagaimana partai-partai Islam dan organisasi ke-Islaman lainnya aktif dalam pentas perpolitikan nasional termasuk didalamnya juga dijelaskan bagaimana kerjasama dan konfrontasinya dengan PKI.

Selanjutnya, penelusuran skripsi yang berkaitan tentang politik, misalnya skripsi yang disusun oleh M. Ridwan berjudul “Sikap Politik Partai Masyumi Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1955–1960)”. Mengupas tentang sikap politik Partai Masyumi terhadap kebijakan Soekarno dan perannya dalam pemerintahan dari periode ke-periode.⁵ Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa Partai Masyumi memiliki peran dalam pemerintahan periode 1955-1960 dengan menjadi partai pendukung pemerintah yang dilihat dari naiknya Burhanudin Harahap sebagai perdana menteri. Serta menjadi partai oposisi di parlemen

⁵ M. Ridwan, “Sikap Politik Partai Masyumi Pada Pemerintahan Sukarno (1955-1960)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

maupun non parlemen. Kemudian skripsi Marwan mahasiswa fakultas syariah menliti tentang “Peran Politik Praktis Kyai dalam Pemberantasan KKN di Sumenep” menyimpulkan bahwa peran kyai dalam memberantas korupsi sangat diperlukan.⁶ Peran tersebut ditunjukkan dengan tauladan, pengawasan, pembinaan-pembinaan dan memberikan keleluasaan kepada para penegak hukum.

Skripsi yang berkenaan dengan PK diajukan M. Isa berjudul “PKS dalam Perspektif Politik Islam (Studi atas AD/ART PK)”, menyimpulkan bahwa PK merupakan partai yang berpandangan integralistik, yaitu tidak membedakan antara agama dan politik. Mementingkan aspek moral dalam mengambil setiap langkah dan kebijakan dengan titik tekan pada orientasi dakwah Islamiyah, baik pada tingkat elit maupun sosial kemasyarakatan.⁷ Kemudian skripsi lain yang membahas PKS adalah saudara Suryanta Bakti Susila. Memaparkan tentang “Konstruksi Wacana Tentang Dakwah Politik PKS dalam Pemilu 2004 di Majalah SAKSI”. Menyimpulkan bahwa PKS mendapatkan momen yang tepat untuk menghadapi pemilu 2004 dengan terus membuat wacana politik dalam majalah SAKSI. Yang kemudian berpengaruh pada naiknya tingkat pemilih dalam pemilu 2004.⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilacak tersebut, baik dari buku-buku yang dipaparkan maupun skripsi tentang partai Islam lainnya tidak ditemukan adanya kesamaan obyek penelitian. Oleh karena itu dapat dikatakan

⁶ Marwan. “Peran Politik Praktis Kyai dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Sumenep”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁷ Muhammad Isa, “PK dalam Perspektif Politik Islam” (Studi atas AD/ART PK), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

⁸ Surtanta Bakti Susila, “Konstruksi Wacana Tentang Dakwah Politik PKS dalam Pemilu 2004 di Majalah SAKSI”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

bahwa penelitian ini orisinil dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Peran berarti suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pemimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atas peristiwa. teori peran atau peranan (Role) dalam ilmu sosiologis merupakan aspek dinamis dengan kedudukan (Status). Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya, begitupun sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Perbedaannya adalah bahwa peranan lebih condong pada dataran fungsi, penyesuaian diri dan proses sedangkan kedudukan hanya menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam suatu tempat sosial. Dengan demikian apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan peranan.⁹

Peran secara bahasa dapat berarti: 1. bertindak sebagai; 2. sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat; 3. bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.¹⁰ Sementara J.S. Badudu, memberikan definisi antara lain: 1. mengambil bagian atau turut aktif dalam suatu kegiatan; 2. Balok yang menghubungkan kepala tiang kepada rumah kayu atau rumah bambu, tempat kasau bertemu dan dipakai atau diikatkan.¹¹

⁹ Soerjono Soekamto, *Sosiologi ; Suatu pengantar, Edisi Baru Keempat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 268

¹⁰ Peter Salim & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm 1132

¹¹ J.S. Badudu & Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1037.

Peranan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui, apalagi kalau ia adalah seseorang atau kelompok mempunyai kedudukan di masyarakat atau di pemerintahan. Karena dari sinilah akan diukur sejauhmana ia menjalankan hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh masyarakat. Untuk mengetahui peranan lebih mendalam Lavinson membagi peranan yang mencakupi tiga hal, antara lain.¹² :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.¹³ Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang

¹² *Ibid*, hlm. 269

¹³ Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 268

pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹⁴

Sebagai pola perilakuan peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:¹⁵

1. *Peranan ideal* sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu.
2. *Peranan yang dianggap oleh diri sendiri*. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, seorang individu menganggap, bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dimaksudnya sendiri), dia harus melaksanakan peranan tertentu.
3. *Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan*. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu didalam kenyataannya, yang terwujud dalam perilakuan yang nyata. Peranan yang dilakukan dalam kenyataan, mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan yang dilakukan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai beberapa peranan sekaligus. Peranan tersebut mencakup juga peranan ideal, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang dilaksanakan. Tidak jarang situasi semacam ini

¹⁴ Ely Chinoy, *Society*, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, hlm. 269.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan*, hlm. 35 – 36.

mendatangkan kesulitan-kesulitan bagi *pemegang peranan* ("role occupant").

Sebab-sebabnya adalah:

1. Sebagai pemegang beberapa peranan sekaligus, seseorang berhubungan dengan berbagai pihak, yang juga mempunyai berbagai peranan sekaligus.
2. Suatu peranan tertentu menghendaki perlakuan-perilakuan yang berbeda-beda (yang kadang-kadang tidak konsisten).
3. Pemegang peranan merupakan penghubung antara pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi pengikut. Di satu pihak dia harus memenuhi keinginan pihak yang berada di atas, dan di pihak lain dia harus pula memenuhi kebutuhan pihak yang berada di bawahnya.¹⁶

Kemudian dalam hal politik ada beberapa hal pokok yang termaktub di dalamnya.¹⁷ yaitu : 1. Negara (*State*), 2. Kekuasaan (*Power*), 3. Pengambilan Keputusan (*Decisionmaking*), 4. Kebijaksanaan (*Policy, Belei*), 5. Pembagian (*Distrubution*) atau (*Allocation*).

Dari kelima konsep-konsep pokok tersebut selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*Public Goals*) yang mungkin dalam hal ini akan diwakili melalui partai-partai. Kemudian dalam defenisi lain, Ramlan Surbakti merangkum pandangan tentang politik sebagai berikut: *Pertama*, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk memberikan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai kegiatan yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36 – 37.

¹⁷ Miriram Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 8 Dst.

diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.¹⁸

Adapun teori yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah menggunakan defenisi yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, yaitu: defenisi *kedua* “segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan pemerintahan”, dan defenisi *keempat* “politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum”.

Di dalam Islam tentang perpolitikan telah meletakkan beberapa prinsip. Prinsip itu antara lain adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al-ummah*). Sedangkan tujuan substansif disyari'atkannya hukum-hukum agama (*syari'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁹ Selanjutnya kemaslahatan itu sendiri nantinya akan melindungi hak-hak dasar manusia yang terdiri dari : a). hak dan kebebasan agama (*hifzu ad-din*), b). keselamatan fisik atau jiwa (*hifz an-nafs*), keselamatan keluarga atau keturunan (*hifz an-nasl*), c). keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-Mal*), dan e). keselamatan akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-Aql*).

Mengenai prinsip-prinsip negara dalam Islam menurut Husein Haykal, Islam mengajarkan beberapa nilai-nilai etika untuk menjadi pijakan dalam

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Granindo, 1992), hlm. 2

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. XI,(Kairo : Dar al-Qalam , 1977), hlm. 197.

penyelenggaraan negara. Prinsip atau nilai etika tersebut adalah : 1). prinsip persaudaraan sesama manusia, 2). prinsip persamaan manusia, 3). prinsip kebebasan manusia.²⁰ Ketiga prinsip ini harus dijunjung dan benar-benar dilaksanakan oleh siapapun dari umat muslim tanpa mengenal suku, ras, dan bahasa serta agama. Pada dataran mekanisme pelaksanaan sistem politik dan kenegaraan, al-Quran memberikan empat prinsip yang bisa dijadikan sebagai asas – asas. antara lain : 1). asas amanat, 2). asas keadilan keselarasan), 3). asas ketaatan (disiplin) dan 4). asas musyawarah dengan referensi al-quran dan as-sunnah.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu pencarian data yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.²² Dalam penyusunan ini akan dilakukan penelitian langsung di Kota Palembang, dengan spesifikasi di DPD PKS Kota Palembang serta instansi terkait

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰ Lihat , Musdah Mulia, Negara Islam ; *Pemikiran Politik Husain Haykal, Seri Disertasi, cet. Ke I, (Jakarta : PARAMADINA , 2001), hlm. 107-173.*

²¹ Abdul Mu'in Salim, *Fiqhi Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 1994), hlm. 306.

²² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Pelitian dan Penulisan Karya Ilmiah,* (Yogyakarta : IKFA PRESS , 1998), hlm. 20-21.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan masalah dan melukiskan keadaan atau peristiwa pada saat sekarang berdasarkan pada fakta – fakta yang nampak sekarang.²³ Kemudian akan dilakukan analisa terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Adapun masalah yang ingin penyusun deskripsikan adalah peran Partai Keadilan Sejahtera dalam pemberantasan korupsi di Palembang, dengan melihat peran sosial mereka di dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Yaitu mengumpulkan data dan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada subyek penelitian. Adapun jenis wawancara yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, seperti yang dikatakan Sutrisno Hadi : penginterview terikat oleh salah satu fungsi bukan saja sebagai pengumpul data melalui tanya jawab, melainkan sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud–maksud penyelidikan yang dipersiapkan dengan matang sebelum kegiatan interview sebenarnya.²⁴ Yang penyusun wawancarai adalah : ketua DPD, DPC dan Ranting PKS di Palembang, KPU serta tokoh masyarakat.

b.Penelusuran Bahan Dokumen

²³ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 1992), hlm. 67

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Reseachm*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990).

Yaitu cara untuk mendapatkan masalah yang ditelusuri lewat dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini buku-buku, artikel, maupun media massa cetak dan elektronik.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, Yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan melihat peran sosial dari Partai Keadilan Sejahtera pada masyarakat setempat.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya penyusun melakukan analisis data dengan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan peran politik partai keadilan Sejahtera dalam pemberantasan korupsi di Palembang. Analisis tersebut tentunya sesuai dengan kemampuan penyusun yang merujuk pada beberapa referensi dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima Bab. Adapun hal-hal termuat pada Bab pertama adalah pendahuluan yang di dalamnya mengemukakan latar belakang masalah penelitian kemudian akan dirumuskan beberapa pokok masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, selanjutnya agar menjamin keorisanilhan penelitian maka dipaparkan buku-buku, skripsi dan penelitian lain yang telah diobservasi. Supaya penelitian lebih sistematis dan tidak rancu perlu dibuat kerangka teoritis,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga benar-benar menjadi penelitian yang bermutu.

Pada bab kedua akan dipaparkan tentang pengertian politik dan partai, fungsi-fungsi partai secara umum. Kemudian macam-macam sistem kepartaian yang ada di dunia, dan yang terakhir akan memaparkan perjalanan partai di Indonesia baik pada masa transisi sampai pada era reformasi.

Pada Bab ketiga akan dipaparkan tentang beberapa citra negatif kota Palembang terutama yang berkaitan tentang kasus korupsi di Palembang, sepak-terjang Partai Keadilan Sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Serta sekilas menelusuri perjalanan partai keadilan sejahtera, Visi & Misi, serta peranannya dalam pentas politik nasional, mulai dari pembentukan partai pertama kali yaitu PK sampai dengan masa sekarang atau PK Sejahtera.

Pada Bab empat penyusun akan berusaha untuk menganalisa dan mencoba memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah yang kami temukan dengan tujuan untuk mengungkap kebaikan ditengah banyaknya keburukan.

Akhirnya kesimpulan dari penelitian ini akan penulis tuangkan dalam Bab kelima, yang sekaligus sebagai bab penutup.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran politik PKS dalam pemberantasan korupsi di Palembang lebih banyak dilakukan dengan memberikan contoh atau tauladan dan proaktif dalam menyikapi beberapa kasus korupsi baik ketika memegang atau tidak memegang suatu jabatan tertentu. Hal ini diharapkan mampu diikuti oleh para politisi, aparat pemerintahan, ummat Islam serta masyarakat Palembang pada umumnya. Kemudian pembinaan pada tingkat internal partai dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan *Halaqah* (Kajian Rutin), MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa) yang diadakan pada waktu tertentu.
2. Dengan dilakukakannya beberapa langkah tersebut bisa membangun komunitas baru atau generasi baru yang berpendidikan, bermoral, professional dan bersih dari segala macam bentuk korupsi. Pada akhirnya mampu menjadi Negara yang aman, damai dan sejahtera serta diridhoi oleh Allah.

B. Saran-Saran

Skandal-skandal korupsi yang berkepanjangan semakin hari semakin menyakiti hati rakyat, bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi “kudeta” apabila pemerintah tidak mampu menanganinya. Karena sejak reformasi bergulir

baik dari pemerintahan BJ. Habibi, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri dan terakhir oleh Susilo Bambang Yudhoyono belum mampu mengikis habis akar penyakit korupsi di tanah air. Bahkan, di era otonomi saat ini korupsi semakin menjadi dan menggila menjalar keseluruh lini kehidupan di negeri ini. berdasarkan keterangan Transparency International tetap menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup.

Perang melawan korupsi memang harus kompak dan seimbang, koruptor tidak akan pernah hilang kalau yang ikut berperang juga adalah pelaku atau orang yang tidak serius dalam membasmi korupsi. Sedikitnya tim pemberantasan korupsi juga ikut berpengaruh dalam hal ini. Dengan kata lain peperangan melawan koruptor dan korupsi akan berjalan berjalan tidak imbang. Padahal jumlah kasus korupsi pada tingkat nasional yang berada di bawah KPK lebih dari 9.000 laporan, walaupun yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti hanya sekitar satu persen, namun jika laporan kasus di KPK yang ditindaklanjuti meningkat, maka jumlah tenaga yang ada di KPK akan tidak seimbang dan tentu butuh waktu yang lama untuk menyelesaiannya.

Namun demikian, sebaik apapun kinerja KPK, kejaksaan, kepolisian di pusat maupun daerah yang memutuskan tetaplah hakim, sedangkan kita tahu sendiri bagaimana hakim di negeri ini, termasuk hakim agung ikut bermasalah. Belum lagi permasalahan lain yang juga akar dari korupsi itu sendiri, yaitu birokrasi yang digaji rendah, tidak professional dan leluasa melakukan korupsi selama 30 tahun, tanpa ada tindakan preventif maupun represif. Maka langkah yang penting nantinya adalah :

1. Memberantas korupsi tidak cukup dengan komitmen pribadi saja, melainkan juga perlu dibuat kurikulum pendidikan di sekolah yang khusus membahas tentang permasalahan korupsi baik lokal maupun nasional.
- 2 Melakukan reformasi kepada instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang birokratik, hal ini dikarenakan sering terjadinya inefisiensi birokrasi dan akuntabilitas kepada publik yang amat lemah. Sehingga sangat rawan terhadap korupsi,
3. Melakukan perubahan kepada beberapa lembaga tinggi Negara, seperti Peradilan, kepolisian dan memberikan keluasan kepada BPK, KPK untuk menjalankan tugas mereka tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Kemudian memperkuat kembali fungsi pengawasan oleh DPRD kota Palembang terhadap kinerja eksekutif.
4. Memberikan peran yang sebesar-besarnya kepada organisasi non pemerintah (ornop) seperti LSM Palembang Corruption Watch, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka bisa bergerak melalui pendidikan masyarakat, pengembangan organisasi masyarakat (ormas), pengembangan wacana, reformasi sistem dan menciptakan arena politik baru.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahnya, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thaba'at Mushhaf as-Syarif, 1415 H.

B. Al-Hadits dan Ulumul Hadits

Al-Bukhāri, *Shohih al-Bukhāri*, ttp: Dar al-Fikri, 1981

At-Tirmizi, al-Jami' as-Shahih, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Hambal, Imam Ahmad bin, Musnad, Beirut: Dar al-Fikr,tt

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XI, Kairo : Dar al-Qalam, 1977.

Salim, Abdul Mui'n, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-quran*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 1994.

Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara ; Kritik Atas Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta : LkiS, 2001.

D. Kelompok Sosial

Chinoy, Ely, *Society.*, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi.*,

Soekanto, Soerjono, Memperkenalkan Sosialogi, Jakarta: CV. Rajawali, 1982

---, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1984

---, Soerjono, *Sosiologi ; Suatu pengantar, Edisi Baru Keempat*, Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 1999

E. Kelompok Politik

Awaludin Hilmi, Munas I PKS di Gedung Basket Senayan, Jakarta, *Kompas*, Senin 1 Agustus 2005.

Azra, Azymardi "Islam di Tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi", dalam Abdul Mu'in D.Z, *Kompas* 2000

Bakti Susila, Suryanta, "Konstruksi Wacana Tentang Dakwah Politik PKS dalam Pemilu 2004 di Majalah SAKSI", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2000

Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta : Teraju, 2002.

DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, Jakarta, 1998.

Furkon, AM, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Teraju, 2004.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Hehamahua, Abdullah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Asas Pembuktian Terbalik", Makalah disampaikan pada Musyawarah Wilayah AMKI (Asosiasi Masjid Kampus seluruh Indonesia) di kampus UNJ, Jakarta, 1 – 2 oktober 2005.

Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E.M, Bandung: Mizan, 1996

Ida, La ode, Prospek PAN Pasca Amien Rais, Opini *Kompas*, Senin 11 April 2005.

Isa,Muhammad, "PK dalam Perspektif Politik Islam" (Studi atas AD/ART PK), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Jufry, Salim, Bayanat Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang Jihad Siyasi,Nopeniber 2001.

Klitgaard, Robert, dkk, *Corrupt Cities, A Praktikal Guide to Cure and Prevention*, terj. Penerbit, Jakarta: Obor, 2002..

KPU Kota Palembang 2004

Lubis, Satria Hadi, *Yang Nyata Dari PK Sejahtera, 77 Manfaat dan Alasan Mengapa Memilih PK Sejahtera dalam Pemilu*, Jakarta : Misyat Publication, 2003.

Machmudi, Yon, *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung : Harakunta Publishing, 2005.

Marwan, "Peran Politik Praktis Kyai dalam Upaya Pembarantasan Korupsi di Sumenep", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Masyarakat Peduli Wong Cilik, *Mengapa Memilih PK Sejahtera, 42 argumen PK Sejahtera harus menang di Pemilu 2004*, Jakarta : 2003.

Matta, Anis" Menikmati Demokrasi, Strategi Dakwah Meraih Kemenangan", Pustaka SAKSI,

Mulia, Musdah, *Negara Islam ; Pemikiran Politik Husain Haykal*, Seri Disertasi, Cet. I, Jakarta : PARAMADINA, 2001.

Mulkhan, Abdul Munir, Syahwat Politik Kaum Santri, Opini Kompas, Edisi Jumat 8 April 2005

Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta : Grafiti Pers, 1987

Nurwahd, Hidayat, Wawancara Majalah SABILI, Tentang Kondisi Negara Indonesia, Edisi, 13, TH. XII, 14 Januari 2005 / 2 Dzulhijjah 1425 H.

Noeh, Fuad Munawar, "Kyai di Republik Maling ", *Republika*,2005.

Ridwan, M,"Sikap Politik Partai Masyumi Pada Pemerintahan Sukarno (1955-1960)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Perpolitikan Liberal*, Yogyakarta : Safiria Insani, Bekerjasama dengan MSI UII, 2004.

.*Sriwijaya Post*, Rabu 9 Maret 2005.

Sriwijaya Post, Senin 28 Maret 2005.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Granindo, 1992,

Suhud, Alynuddin, "Lokomotif Reformasi Bernama Partai Keadilan", SAKSI April 2003

UU RI No. 31/1999,Bab I Pasal 1 ayat (1).

UU No. 20/2001 pasal 2 (1).

"Wajah Kusam Partai Politik", *Kompas*, Senin 9 Januari 2006.

Yuntho, Emeson, "Penanganan Korupsi di Daerah", *Sumatera Ekspres*, 13 Maret 2006.

Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, Yogyakarta: LESFI, 2004.

F. Kelompok Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. Yogakarta : IKFA PRESS, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metode Reseachm*, Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta : 1990

Nawawi, Hadari, *Instrumen Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992.

Profil Kota Palembang, Dinas Pariwisata Kota Palembang: 2004.

